
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PULAU MOROTAI

Oleh

Nurhikmah Sibua¹, Lukman Wangko², Arkal Lotar³

^{1,2,3}Universitas Pasifik Morotai

E-mail: 1sibuanurhikmah@gmail.com

Article History:

Received: 23-05-2023

Revised: 16-06-2023

Accepted: 25-06-2023

Keywords:

Factors of Regional Original Income, Local Government. Morotai Island Regency.

Abstract: *The purpose of this study was to determine the factors that influence the regional original income of Morotai Island Regency. The type of research used is descriptive qualitative analysis. Collecting qualitative descriptive analysis data by means of observation, interviews, and documentation. The results of this study are the performance of regional financial management describing the performance of the Morotai Island Regency government at the level of decentralization, the degree of contribution of regional original revenue to total regional revenue, regional financial capacity is still very low, and the factors that influence Regional Original Revenue in Regional Financial and Asset Management Revenue Agency Morotai Island Regency; The factor of the minimal contribution of restaurants and hotels in optimizing the sources of regional original revenue, the factor of the ineffectiveness of related agencies or agencies in optimizing the sources of regional original revenue; and the population factor for the regional original income of Morotai Island Regency.*

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu pembangunan tidak lepas dari peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Pada prinsipnya pemberian otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah, bertujuan untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah. Dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan di daerah serta pelayanan publik dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

Salah satu bentuk kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat secara penuh terhadap pemerintah daerah otonomi untuk mengelola daerahnya dalam berbagai aspek diantaranya adalah aspek keuangan yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari tiga macam, yaitu Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus. Dengan desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga Pemerintah Daerah dapat mandiri dalam mengelola keuangannya sendiri serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Ciri utama yang menandakan kemandirian suatu daerah dapat di lihat dari keuangan daerahnya, dimana suatu daerah mengelola keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Bentuk sumber penerimaan daerah menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 pasal 285 menyebutkan bahwa sumber-sumber pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Soleh dan Rochmansjah (2010) menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun Dana Bagi Hasil, sedangkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relative kecil. Adanya Dana Perimbangan melalui DAU ini ternyata justru menjadi ketergantungan. Prakosa (2007) mengatakan bahwa, dengan adanya transfer dana dari Pemerintah pusat tersebut, bagi Pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama Pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah.

Tujuan dari transfer daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah yang satu dengan lainnya dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Seharusnya kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber dana yang didapatkan oleh pemerintah diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Semakin banyak kebutuhan yang dapat di biayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin dapat dikatakan mandiri suatu daerah dan semakin menurun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Hal ini dapat menyebabkan terdapat daerah yang maju dan juga daerah yang tertinggal, tergeantung dari potensi yang dimiliki di daerahnya tersebut dan bagaimana mengelola potensi tersebut untuk menghasilkan nilai ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, dapat dihitung oleh besaran Tingkat Pengeluaran Pemerintah dalam membelanjakan untuk proses pembangunan daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk yang berkaitan dengan peningkatan produksi barang maupun jasa sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi ekonomi di suatu daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu. (Fisanti, 2013). PAD sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

Adanya aktifitas penduduk pada perekonomian menyebabkan gejolak ekonomi secara menyeluruh atas permintaan barang dan jasa yang berlebihan biasanya disebut inflasi. Adanya inflasi di Kota menggambarkan adanya gejolak ekonomi, apabila inflasi tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dikendalikan akan berdampak pada perekonomian, karena inflasi yang baik kurang dari 10 % apabila inflasi melebihi dari 25% akan mengakibatkan nilai barang tinggi dan berdampak pada nilai tukar rupiah yang akan semakin menurun (Iwan Susanto, 2014).

Berdasarkan pengamatan peneliti pada akhir bulan Desember tanggal 5 tahun 2023 pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Morotai dan data LRA Anggaran pada tahun 2020 Pemerintah Daerah tidak memiliki target anggaran artinya (0,00%) PAD, sedangkan Realiasi PAD Anggaran sebesar Rp. 3.061.873.487.07, dan pada tahun 2021 Target Anggaran PAD sebesar 68.157.350.299.99, dengan realisasi PAD sebesar 35.589.758.142.61 data di atas menjelaskan kurangnya progres dari pemerintah daerah, ditambah lagi dengan wawancara melalui Kepala Bidang (KABID) Pendapatan dan Aset menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah kabupaten pulau morotai Per 5 Desember 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis. Sebab, capaian yang direalisasi hanya dibawah angka 20% (20 Miliar). Sementara Target yang direncanakan kurang lebih 50% (50 Miliar).

Dari Uraian masalah di atas, Peneliti tertarik sehingga perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai mengetahui faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pulau Morotai.

LANDASAN TEORI

Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan tujuan untuk memberikan kewenangan terhadap daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. (Mayza, dkk, 2015). Dengan kata lain sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana perkembangan suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, Halim (2002). Mengungkapkan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh Dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Mardianso (2002).

Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang -Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 3, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan Otonomi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Dalam Upaya peningkatkan (PAD), daerah dilarang melakukan beberapa hal diantaranya : 1). Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan asli daerah yang menyebabkan biaya ekonomi melambung tinggi; dan, 2). Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antara daerah, dan kegiatan impor dan ekspor.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Klasifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelompokkan menjadi empat (Halim, 2008) terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulau Morotai. Analisis deskriptif kualitatif merupakan transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang dimana cara pengumpulan data analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Morotai. Secara umum masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pelaksana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 sampai dengan 2022. Hasil kinerja pengelolaan keuangan daerah menggambarkan kinerja pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tingkat desentralisasi derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, kemampuan keuangan daerah masih sangat rendah. Faktor apakah yang menyebabkan dapat dilihat dari hasil wawancara oleh Kepala Bidang Pendapatan Dan Pajak, sebagai berikut;

- Faktor Minimnya Kontribusi Restoran dan Hotel dalam mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pulau Morotai saat ini sangat banyak, mulai dari peningkatan pajak, Pengeluaran pemerintah dan peningkatan ekonomi. Morotai dalam beberapa tahun terakhir ini PAD nya mengalami stagnan yang begitu signifikan, hal ini akibat dari pada putaran sektor ekonomi di Morotai yang melemah, lesuh, oleh karena itu sumbangsi dan kontribusi pajak masih terlalu kecil”.

Selain itu pernyataan tambahan responden menjelaskan bahwa;

“Hal inipun dapat di ukur dari beberpa pelaku usaha, khususnya Restoran dan Perhotelan kontribusinya sangat kecil otomatis kita (Pemerintah) tidak bisa mengambil langka untuk memunggut dengan skalah yang terlalu besar. Sehingga dengan sendirinya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa jumlah restoran dan hotel merupakan salah satu factor yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dengan tersedianya kamar hotel dan restoran yang memadai maka akan menarik wisatawan untuk singgah dan menginap di hotel tersebut sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui pembayaran pajak yang efektif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Solot, 2018) yang menyatakan bahwa jumlah hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan.

- Faktor kurang efektif Dinas atau Instansi terkait dalam mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatana Asli Daerah (PAD)

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektif adalah kurangnya partisipasi Dinas atau Instansi terkait dalam mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatana Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai, dapat dilihat dari hasil wawancara oleh Kepala Bidang Pendapatan Dan Pajak, sebagai berikut;

“Ada beberapa Dinas atau instansi, Misalnya Dinas parawisata, dinas Kesehatan, dll yang notabennya sebagai penyumbang PAD di morotai kurang begitu efektif mengoptimal sumber-sumber pendapatan, sehingga dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Bahkan dalam Tiga tahun berturut-turut ini, Dinas Parawaista yang sebagai sumber pendapatan sangat kecil sumbangsinya. disusul lagi dengan beberapa dinas, Misalnya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Infokom dan masi ada beberapa dinas yang punya kontribusi terhadap PAD sangat kecil. Padahal, kalau dilihat dari anggaranya, dinas-dinas terkait itu sangat cukup besar, karena posisinya yang begitu strategis”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektif disebabkan adanya Dinas atau Instansi terkait kurang mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatana Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini tidak sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dari badan pendapatan asli daerah saat ini;

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu pula Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- c. Pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan program/rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupate; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, (LKJiB Bapenda; 2022).
- Faktor Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatana Asli Daerah (PAD)

Salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimal sumber-sumber Pendapatana Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai, Hasil wawancara oleh Kepala Bidang Pendapatan Dan Pajak, sebagai berikut;

“Lebih Lanjut, kepala bidan Pendapatan dan aset. Bahwa Pengeluaran Pemerintah dan Peningkatan Jumlah Penduduk juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli daerah. Karena Sumber pendapatan Daerah salah satunya adalah Peningkatan Pengeluaran pemerintah, Misalnya Pemerintah melakukan pembelanjaan dalam rangka melengkapi kebutuhan-kebutuhan daerah, Otomatis ada perhatian dari pemerintah untuk menambah anggaran lewat DAK, DAU maupun Korting ABPDnya ditambah. Kemudian Terkait dengan Jumlah Penduduk, Bahwa Jumlah Penduduk juga mempunyai Pengaruh Terhadap PAD, juga punya kontribusi dari sisi Pajak PBB, otomatis populasi bertambah atau objek pajaknya bertambah. Jadi sangat jelas, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemrintah juga berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Pulau Morotai”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh kurang optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai adalah pada jumlah penduduk. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamalia, Nailia. dkk. (2019), menjelaskan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD karena semakin besar jumlah penduduk maka akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan juga tingkat produksi yang dihasilkan untuk meningkatkan PAD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Morotai;
 - a. Faktor minimnya kontribusi restoran dan hotel dalam mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatana Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai,
 - b. Faktor kurang efektif dinas atau instansi terkait dalam mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatana Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - c. Faktor jumlah penduduk terhadap Pendapatana Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahman, 1987, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, MSP, Jakarta.
- [2] Agustin D. M. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsijawa Timur Tahun 2014-2016". Artikel. Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI. Kediri 2018.
- [3] Atmaja A. E. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Dipanigoro. Semarang 2011.
- [4] Bembok Sane, Een N Walewanko dan Hanly Siwu. "Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi pendapatan asli Daerah di Kabupaten Tolikara". Jurnal Berkalas Ilmiah Efisiensi, Vol. 20, No.01. Tahun 2020.Diakses Pada 05 jnuari 2023.
- [5] Hendriyani. N. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada DPPKAD, BAPPEDA, dan BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2015)". Skripsi. Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dab Bisnis Univeritas Muhamadiyah. Surakarta 2017.
- [6] Hibjon. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatra Selatan" Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 5, No. 2. Desember 2007. Diakses pada 04 Januari 2023.
- [7] Hirawan, Susiyati, 1997, Pengaruh Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, BPFE UGM, Yogyakarta
- [8] Kamalia, Nailia. dkk. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Jurnal Penelitian. UAD. Yogyakarta.
- [9] Kustiyono T. F. "Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Periode Tahun Anggaran 2008-2010". Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang. Semarang 2011.
- [10] Mujahidin. "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Penjatatanya Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa". Skripsi, Universitas Muhammadiyah. Makasar 2018.
- [11] Prabawa Agus. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas". Majalah Ilmiah Ekonomi, Vol. 12, No 3. Agustus 2009. Diakses Pada 05 Januari 2023.
- [12] Prasetyo Aris Adi, Virgiana Nugransih Siwi dan Eranus Yoga Kudhani. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah 2010-2018". Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat, Vol. 1, No.1. Diakses Pada 04 Januari 2023.
- [13] Santosa Purbayu budi dan Retno Puji Rahayu. "Aalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri". Dinamika Pembangunan, Vol. 2, No. 4. Juli 2005. Diakses pada 04 Januari 2023.
- [14] Solot. Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening (Studi Kasus di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016). Jurnal Ekobisnis. 2018. No. 2. Vol.1.
- [15] Subri, Mulyadi. 2003 Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN